

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**IMPLIKASI MASA TUNGGU PELAKSANAAN EKSEKUSI
TERHADAP TERPIDANA MATI**



OLEH :

RENDA ARANGGRAENI, S.H.

NIM. 031924153052

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**IMPLIKASI MASA TUNGGU PELAKSANAAN EKSEKUSI
TERHADAP TERPIDANA MATI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

OLEH :

RENDA ARANGGRAENI, S.H.

NIM. 031924153052

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 31 Januari 2022

Oleh

Dosen Pembimbing Utama



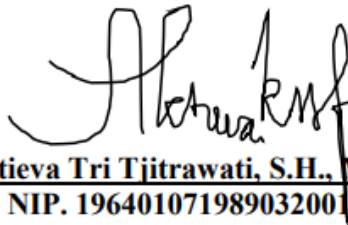
Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

Dosen Pembimbing Kedua



Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum
NIP. 196809281997021001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 18 Januari 2022

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002

Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

2. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP. 196809281997021001

3. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001

4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
NIP. 198608222008121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENDA ARANGGRAENI, S.H.

NIM : 031924153052

Judul Tesis : Implikasi Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Terhadap Terpidana Mati

Alamat : Medokan Semampir Blok A/27, RT/RW 002/003, Sukolilo, Surabaya, 60119.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 31 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

A yellow rectangular official stamp with a red border and a Garuda emblem. The text on the stamp includes 'MEPERAL TEMPEL' and a unique code 'FCEAIX56169446'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Renda Aranggraeni, S.H.
NIM. 031924153052

MOTTO

“Hidup yang tidak diperjuangkan, tidak akan pernah dimenangkan”

dan adakalanya,

kita harus mundur sedikit hanya untuk melompat lebih jauh.

ABSTRAK

Masa tunggu eksekusi yang tidak menemukan kepastian dan tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu pelaksanaan eksekusi pasca putusan *inkracht*. Pelaksanaan eksekusi pidana mati menjadi ranah di Kementerian Hukum dan HAM tugas dari Direktorat Administrasi Hukum dan Perundang-undangan, namun dalam struktur organisasi belum ada bidang maupun sub bidang yang menangani grasi secara khusus, selain itu belum ada prosedur standar tertulis dalam penanganannya. Penulisan tesis ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana mati dan terhadap ketidakpastian mekanisme pelaksanaan tersebut menjadi tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak terpidana mati dalam masa tunggu eksekusi. Pemberian hak-hak terpidana mati terkait pengajuan grasi sebagai bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana mati agar mendapat kepastian hukum atas dirinya untuk dapat segera mendapat jawaban apakah ditolak atau diterima permohonan grasi yang diajukannya. Tidak secara implisit dijelaskan di dalam peraturan batas waktu pemberian jawaban atas permohonan grasi yang diajukan, sehingga menyebabkan masa tunggu yang berkepanjangan. Penulisan ini mengedepankan penelitian perundang-undangan dan konseptual, yang dalam penulisannya dengan mengumpulkan sumber bahan hukum seperti beragam regulasi maupun putusan pengadilan serta jurnal hukum. Dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif yaitu dengan mengedepankan mengenai azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum. Kesimpulan atau hasil akhir yang ingin dicapai atas isu hukum yang ada, mengenai implikasi masa tunggu pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati, memberikan hasil bahwa harus ada suatu peraturan mengenai jangka waktu pelaksanaan, dengan pemberian jawaban atas permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati, sehingga memberikan kepastian hukum serta jaminan atas kehidupan terpidana mati.

Kata kunci : Eksekusi, Implikasi, Gangguan Mental, Hukuman Mati, Kekuatan Hukum Tetap.

ABSTRACT

The waiting period for execution that does not find certainty and there is no clear regulation regarding the period of execution after the inkracht decision. The execution of the death penalty is the domain of the Ministry of Law and Human Rights, the task of the Directorate of Legal Administration and Legislation, but in the organizational structure there are no fields or sub-sectors that specifically handle clemency, besides that there is no written standard procedure for handling it. The writing of this thesis discusses the legal certainty of the mechanism for implementing the execution of the death penalty and the uncertainty of the implementation mechanism is the responsibility of the state for the fulfillment of the rights of death convicts in the waiting period for execution. The granting of the rights of the death row convict related to the application for clemency as a form of legal effort that can be taken by the death row convict in order to obtain legal certainty over himself so that he can immediately get an answer whether his petition for clemency will be rejected or accepted. It is not implicitly explained in the regulation on the deadline for responding to a request for clemency, thus causing a prolonged waiting period. This writing emphasizes statutory and conceptual research, which in writing is by collecting sources of legal materials such as various regulations and court decisions and legal journals. In writing this thesis, a juridical-normative type of research is used, namely by prioritizing the principles of law, research on legal systematics. The conclusion or final result to be achieved on the existing legal issues, regarding the implications of the waiting period for the execution of the death row convicts, gives the result that there must be a regulation regarding the implementation period, by providing an answer to the request for clemency submitted by the death row convict, thus providing certainty law and guarantees for the life of those sentenced to death..

Keywords: *Execution, Implication, Mental Disorder, Capital Punishment, Inkraacht.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660, untuk selanjutnya disebut KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 2/PNPS1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38);
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi;

Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-036/A1jal09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan mengucap Alhamdulillah, penulis telah mendapatkan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Penulisan tesis ini dalam rangka melengkapi nilai tugas serta memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dengan demikian, tesis ini berupaya untuk menjelaskan dan menganalisis secara keilmuan mengenai berbagai fenomena yuridis maupun historis, sosiologis tentang pelaksanaan masa tunggu eksekusi terpidana mati.

Tema kajian terhadap permasalahan hukum pelaksanaan eksekusi pidana mati terasa sudah tidak adanya relevansi dan pembenaran secara teoritik maupun praktis seiring dengan bergulirnya kemajuan teknologi di kalangan masyarakat. Penulisan tesis ini telah memberikan gambaran umum bagi keberadaan dan keberlakuan ketentuan hukum adanya masa tunggu pelaksanaan eksekusi yang berlarut-larut sehingga berakibat terhadap psikologis terpidana mati. Selesaiannya penulisan tesis ini-pun tidak terlepas dari sumbangsih banyak pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi, semoga Allah SWT membalas kebaikan serta senantiasa memberikan kesehatan yang baik, kepada :

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.t., A.k., C.MA., selaku Rektor beserta jajaran wakil rector Universitas Airlangga.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Enny Narwati, S.H., M.H., Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berperan dalam masa perkuliahan penulis.
3. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen penguji yang telah memberikan waktu, saran, arahan, bimbingan serta kesabaran beliau yang diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku dosen MKPT I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta saran untuk penulisan tesis ini.
6. Ibu Dwi Rahayu Kristianti S.H., M.A., selaku Dosen wali yang telah memotivasi penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Bapak dan/atau Ibu dosen serta para staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya Departemen Hukum Pidana yang telah banyak membantu penulis, memotivasi dan memberikan perhatian serta

doa kepada penulis, yang sampai kapan-pun tidak akan dapat penulis membalas jasa-jasa beliau.

8. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua penulis, Bapak (Soewi Hadi Santoso) dan Ibu (Yayuk Umiati) terima kasih atas cinta, doa dan segalanya, yang memberikan motivasi dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Kepada Kakak (Rini Primita Sari) dan Adik (Ratna Ramadhanti, Dani Kusuma, Inova Alya Santoso) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Bapak Dr. Adang Oktori , D.P., S.H., M.H., yang telah dengan ikhlas membantu dalam perumusan topik dalam tesis ini.
11. Andi Fadillah, S.H., Sri Reski Putri, S.H., Giovanni Dinda, S.H. Nina Farah Adella, S.H., Joey Josua Pattiwael, S.H., Achmad Syahiruddin, S.H., M.H. dan Yanto Yunus, S.H., M.H. sahabat penulis selama mengambil kelas magister yang senantiasa bersama, memberikan semangat, dan mewarnai masa-masa perkuliahan penulis.
12. Teruntuk para rekan kerja selama di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan yang selalu memberi motivasi kepada penulis dan terima kasih atas ilmunya.
13. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis, kiranya penulis mohon maaf.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan yang dapat dikirimkan melalui email penulis rendaaranggraeni@gmail.com. Penulis juga berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata, semoga dengan tercapainya penyelesaian tesis ini, dapat menyumbang pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia lebih khususnya perkembangan hukum acara pidana dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin

Surabaya, 31 Januari 2022



Renda Aranggraeni, S.H.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2. Tujuan Penelitian	7
1.3. Manfaat Penelitian	7
1.4. Tinjauan Pustaka	7
1.4.1. Masa Tunggu Terpidana Mati	8
1.4.2. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati	11
1.5. Metode Penelitian.....	16
1.5.1. Tipe Penelitian	16
1.5.2. Pendekatan Masalah	17
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	17
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	21
1.6. Sistematika Penulisan	21

BAB II KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI

PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA ..	23
2.1. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Menurut KUHP	23
2.1.1. Pidana Mati Menurut Hukum Positif Indonesia	28
2.1.2. <i>Ius Constituendum</i> Pidana Mati dalam R-KUHP	30
2.2. Upaya Hukum bagi Terpidana Mati	33
2.2.1. Upaya Hukum Biasa	36
2.2.2. Upaya Hukum Luar Biasa	38
2.3. Pelaksanaan Putusan Pidana Mati	42
2.3.1. Dasar Hukum Permohonan Grasi	47
2.3.2. Prosedur Permohonan Grasi	54

BAB III TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KONDISI TERPIDANA

MATI SELAMA MASA TUNGGU EKSEKUSI.....	55
3.1. Konsep Tanggung Jawab Negara.....	55
3.1.1. Hak Terpidana di Luar Upaya Hukum.....	57
3.1.2. Masa Tunggu Terpidana Mati Menjelang Eksekusi	58
3.2. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Terpidana.....	59
3.2.1. Penanganan Terpidana Mati saat Menjalani Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati	62
3.2.2. Syarat-Syarat Sebelum Pelaksanaan Eksekusi	64
3.3. Psikologis Terpidana Mati menjalani Masa Tunggu Eksekusi	65

BAB IV PENUTUP.....

4.1. Kesimpulan	72
-----------------------	----

4.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	76